



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67 T/INSP

Lamp. : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Bontolempangan
Kab. Gowa Tahun 2023

Kepada

Yth. Camat Bontolempangan
Kab. Gowa

di-

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Bontolempangan Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sitem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

- 1) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,00	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,10	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,10	74,25
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

- Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun belum terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya serta dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

- Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.
- Evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

b. Rekomendasi

- 1) Memperbaiki rumusan hasil dengan melakukan evaluasi pada dokumen perencanaan menggunakan kriteria 5W + 2H sesuai dengan kondisi kerja yang akan dicapai.
- 2) Melakukan perbaikan dengan memberikan penjelasan yang memadai terkait hasil kinerja sebelumnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.
- 3) Menyusun dokumen laporan kinerja yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan evaluasi target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan mengacu kriteria SMART.
- 5) Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi akuntabilitas secara mendalam.

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai dan predikat **74,25 (Sangat Baik)**.

Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR KAB. GOWA,



H. ANDY AZIS, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

HERMAN, ST, MT

Pangkat : Penata Tk. I/III.d
NIP. 19790907 200904 1 002

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.